

5 Kode Etik bagi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Dalam hal konflik bersenjata, Kode Etik ini akan ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional.

Kode Etik dipaparkan terlebih dahulu. Kemudian dilampirkan tiga tambahan, menguraikan lingkungan kerja yang kami harap dapat diciptakan oleh Pemerintah-pemerintah tuan rumah, Negara-negara Donor dan Organisasi Antar-Pemerintah dalam rangka memudahkan penyampaian bantuan kemanusiaan secara efektif.

Definisi

NGO atau LSM: NGO (Non-Governmental Organisations) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mengacu pada organisasi-organisasi, baik nasional maupun internasional, yang dibentuk terpisah dari pemerintah di negara dimana organisasi-organisasi itu didirikan.

Disusun bersama-sama oleh Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah serta ICRC¹

Tujuan

Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga standar perilaku kami. Dokumen ini tidak membahas tentang rincian operasional, misalnya bagaimana petugas menghitung ransum makanan atau mendirikan sebuah kamp pengungsi. Melainkan, menetapkan standar-standar kemandirian, keefektifan dan hasil yang ingin dicapai oleh LSM-LSM dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam penanggulangan bencana. Dokumen ini adalah suatu pedoman sukarela, yang didasari oleh keinginan dari organisasi-organisasi yang menerimanya untuk menjaga standar yang ditetapkan dalam Kode Etik ini.

Catatan

¹ Disponsori oleh: Caritas Internationalis*, Catholic Relief Services*, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, International Save the Children Alliance*, Lutheran World Federation*, Oxfam*, The World Council of Churches*, The International Committee of the Red Cross. (* anggota Steering Committee for Humanitarian Response).

NGHA: Untuk kepentingan dokumen ini, istilah Non-Governmental Humanitarian Agencies (NGHA) atau Lembaga Kemanusiaan Non-Pemerintah dirumuskan untuk meliputi unsur-unsur dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional – Komite Internasional Palang Merah, Federasi Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan anggota Masyarakat Nasionalnya – dan LSM yang didefinisikan di atas. Kode Etik ini mengacu khusus kepada NGHA yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

IGO: IGO (Inter-Governmental Organisations) atau Organisasi Antar-Pemerintah mengacu pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh dua pemerintah atau lebih. Maka ini meliputi juga semua badan-badan PBB dan organisasi-organisasi regional.

Bencana: bencana adalah suatu peristiwa kemalangan luar biasa yang berakibat hilangnya nyawa, penderitaan manusia dan tekanan batin, dan kerusakan material besar-besaran.

Kode Etik

Prinsip-Prinsip Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan LSM-LSM dalam Program-program Penanggulangan Bencana

1 Amanat Kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu

Hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan, dan untuk menawarkannya, merupakan suatu prinsip kemanusiaan paling mendasar yang harus dimiliki oleh semua warga negara dari semua negara. Sebagai warga dari masyarakat internasional, kami menyadari kewajiban kami untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dimanapun dibutuhkan. Oleh sebab itu kebutuhan kami akan akses seluas-luasnya terhadap penduduk korban bencana merupakan kepentingan paling mendasar untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dorongan utama kami dalam menanggulangi bencana adalah untuk meringankan penderitaan manusia diantara mereka yang paling kurang mampu untuk menanggung beban yang disebabkan oleh bencana. Ketika kami memberikan bantuan kemanusiaan maka hal itu bukanlah suatu pemihakan atau tindakan politik dan tidak seyogyanya dipandang seperti itu.

2 Bantuan diberikan tanpa memandang ras, agama atau kebangsaan dari para penerimanya dan tanpa perbedaan berdasarkan buruk sangka apapun. Prioritas bantuan diperhitungkan berdasarkan pada kebutuhan semata.

Sejauh memungkinkan, kami akan mendasarkan penyediaan bantuan mengikuti pengkajian yang mendalam tentang kebutuhan-kebutuhan para korban bencana dan kemampuan-kemampuan setempat yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dalam segala aspek dari program-program kami, akan kami cerminkan pertimbangan-pertimbangan tentang proporsinya. Penderitaan manusia

harus diringankan dimanapun hal itu terjadi; kehidupan itu adalah berharga di bagian manapun dari suatu negara ia berada. Maka penyediaan bantuan kami akan mencerminkan derajat penderitaan yang ingin diringankannya.

Dalam pelaksanaan pendekatan ini, kami menyadari peran kunci dari kaum perempuan pada masyarakat yang rawan bencana dan akan memastikan bahwa peran ini didukung, bukannya dikurangi, oleh program-program bantuan kami.

Penerapan dari suatu kebijaksanaan yang universal, adil dan independen hanya bisa efektif apabila kami dan mitra-mitra kami mempunyai akses terhadap sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk menyediakan bantuan yang berkeadilan, dan jika kami memiliki akses yang merata terhadap semua korban bencana.

3 Bantuan tidak akan digunakan untuk mengejar kepentingan suatu pandangan politik atau keagamaan tertentu

Bantuan kemanusiaan akan diberikan sesuai kebutuhan dari orang-orangan, keluarga-keluarga dan masyarakat-masyarakat. Tanpa mengingkari hak dari NGHHA untuk memegang pandangan-pandangan politik dan agama tertentu, kami memastikan bahwa bantuan tidak akan ditentukan oleh kepercayaan para penerimanya terhadap pandangan-pandangan tersebut.

Kami tidak akan mengaitkan janji, penyampaian, atau pembagian bantuan dengan pemihakan atau penerimaan terhadap keyakinan-politik ataupun keagamaan.

4 Kami akan berusaha untuk tidak bertindak sebagai alat kebijaksanaan luar negeri dari pemerintah

NGHHA adalah lembaga-lembaga yang bertindak mandiri dari pemerintah-pemerintah. Oleh sebab itu kami menyusun kebijaksanaan dan strategi-strategi pelaksanaan kami sendiri dan tidak berusaha untuk melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah manapun, kecuali kalau hal itu kebetulan searah dengan kebijakan mandiri kami sendiri.

Kami tidak akan, baik sengaja –atau karena keterledoran- memperbolehkan kami sendiri, atau para pegawai kami, dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, yang pada hakekatnya peka secara politis, militer, maupun ekonomis, oleh pemerintah-pemerintah atau badan-badan yang mungkin mempunyai tujuan-tujuan lain yang bukan sepenuhnya kemanusiaan, dan kami juga tidak akan bertindak sebagai alat kebijaksanaan luar negeri dari negara-negara donor.

Kami akan mempergunakan bantuan yang kami terima untuk menanggapi kebutuhan dan bantuan ini tidak boleh didorong oleh keperluan para donor untuk menghabiskan kelebihan-kelebihan barangnya, ataupun oleh kepentingan politis dari donor tertentu.

Kami menghargai dan menggalakkan pemberian secara sukarela baik tenaga maupun dana dari orang-perorangan yang mempunyai kepedulian untuk membantu pekerjaan kami dan menyadari kerelaan perbuatan yang timbul dari tindakan sukarela seperti itu. Dalam rangka melindungi kemandirian, kami akan berusaha untuk menghindari ketergantungan terhadap satu sumber pendanaan saja.

5 Kami akan menghargai kebudayaan dan adat istiadat

Kami akan berusaha untuk menghargai kebudayaan, struktur, dan adat istiadat dari masyarakat dan negara dimana kami bekerja.

6 Kami akan berupaya untuk membangun tanggapan terhadap bencana dengan bertumpu pada kemampuan setempat

Semua manusia dan masyarakat - bahkan dalam situasi bencana - memiliki kemampuan dan kerentanan. Apabila dimungkinkan, kami akan menguatkan kemampuan ini dengan mempekerjakan orang-orang setempat, membeli bahan-bahan setempat, dan menjual beli dengan

perusahaan-perusahaan setempat. Apabila dimungkinkan, kami akan bekerja melalui NGHA setempat sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan bekerjasama dengan struktur pemerintah lokal sebagaimana mestinya.

Kami akan memberikan prioritas yang tinggi pada koordinasi yang baik dari tanggapan-tanggap darurat kami. Koordinasi ini paling tepat dilakukan di negara yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang terlibat paling langsung dalam operasi penanggulangan, dan harus mengikutsertakan perwakilan dari badan-badan PBB yang terkait.

7 Harus dicari cara-cara untuk melibatkan para penerima dalam pengelolaan bantuan penanggulangan

Bantuan penanggulangan bencana tidak boleh dipaksakan kepada para penerima. Penanggulangan yang efektif dan pemulihan yang berkesinambungan dapat dicapai sebaik-baiknya apabila para calon penerima dilibatkan dalam, perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan dari program bantuan. Kami akan terus berupaya peranserta sepenuhnya dari masyarakat dalam program-program penanggulangan dan rehabilitasi kami.

8 Bantuan penanggulangan harus terus berupaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dimasa depan sambil, secara bersamaan, memenuhi kabutuhan-kebutuhan dasar

Semua tindakan penanggulangan berpengaruh pada prospek pembangunan jangka panjang, entah secara positif ataupun negatif. Menyadari hal itu, kami akan terus berupaya untuk melaksanakan program-program penanggulangan yang secara aktif mengurangi kerentanan masyarakat penerima terhadap bencana dimasa depan dan membantu untuk menciptakan gaya-gaya hidup yang berkelanjutan. Kami akan secara khusus memperhatikan masalah-masalah lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan program-program bantuan penanggulangan. Kami juga akan berusaha untuk mengurangi dampak buruk dari bantuan kemanusiaan, dengan berusaha untuk menghindari ketergantungan jangka

kami akan selalu menggambarkan citra sebenar-adanya dari situasi bencana dimana kemampuan dan harapan para korban ditonjolkan, dan bukan hanya kerentanan dan ketakutan mereka saja.

Meskipun kami akan bekerjasama dengan pihak media untuk meningkatkan tanggapan masyarakat umum, kami tidak akan membiarkan tuntutan-tuntutan publisitas, baik dari dalam maupun dari luar, yang akan mengalahkannya prinsip pemanfaatan sepenuhnya bantuan penanggulangan.

Kami akan menghindari persaingan dengan lembaga-lembaga penanggulangan bencana lain dalam hal liputan media pada situasi dimana liputan tersebut dapat merugikan pelayanan yang diberikan untuk para penerima atau merugikan keamanan staf kami atau para penerima bantuan.

Lingkungan Kerja

Setelah secara sepihak menyetujui untuk berupaya mematuhi Kode Etik tersebut, kami memaparkan beberapa petunjuk pedoman yang menguraikan suatu lingkungan kerja yang kami harap dapat diciptakan oleh pemerintah negara donor, pemerintah setempat dan organisasi antar-pemerintah – terutama badan-badan PBB – dalam rangka memudahkan peranserta yang efektif dari para NGHA dalam penanggulangan bencana.

Petunjuk-petunjuk ini disampaikan sebagai pedoman. Mereka tidak mengikat secara hukum dan kami tidak mengharapkan bahwa pemerintah dan IGOs menyatakan penerimaan mereka terhadap pedoman ini melalui penandatanganan dokumen apapun, sekalipun mungkin itu bisa menjadi tujuan yang mungkin diusahakan dimasa mendatang. Pedoman ini disampaikan dalam semangat keterbukaan dan kerjasama sehingga mitra-mitra kami menjadi lebih mengetahui bagaimana hubungan ideal yang ingin kami jalini bersama mereka.

panjang para masyarakat penerima terhadap bantuan dari luar.

9 Kami mempertanggungjawabkan diri kami baik kepada pihak-pihak yang kami bantu maupun pihak-pihak darimana kami menerima sumber-sumberdaya

Kami sering bertindak sebagai lembaga penghubung dalam kemitraan antara pihak yang ingin membantu dan pihak yang membutuhkan bantuan dalam situasi bencana. Oleh sebab itu kami mempertanggungjawabkan diri kami kepada kedua belah pihak tersebut.

Apapun yang kami kerjakan dengan donor dan penerima harus mencerminkan keterbukaan dan sikap keterbukaan dan transparansi.

Kami menyadari perlunya melaporkan kegiatan-kegiatan kami, baik dari sudut pandang pendanaan dan keefektifan.

Kami menyadari kewajiban kami untuk memastikan pemantauan pembagian bantuan sebagaimana mestinya dan untuk melaksanakan pengkajian secara teratur akan dampak dari bantuan penanggulangan bencana.

Kami juga berusaha melaporkan, secara terbuka, dampak akhir dari pekerjaan kami, dan faktor-faktor yang membatasi atau membantu dampak tersebut.

Program-program kami akan dilandaskan pada standar profesionalisme dan kepakaran yang tinggi dalam agar mengurangi pemborosan sumberdaya yang berharga.

10 Dalam kegiatan-kegiatan informasi, publikasi dan pengiklanan, kami akan selalu memandang para korban bencana sebagai manusia-manusia bermartabat, dan bukan sebagai obyek yang tidak berpengharapan

Penghargaan terhadap korban bencana sebagai mitra yang setara dalam tindakan tidak boleh terabaikan. Pada setiap kegiatan penerangan umum

Tambahan I: Saran-saran untuk pemerintah negara-negara yang mengalami bencana

1 Pemerintah seharusnya mengenali dan menghargai tindakan-tindakan yang mandiri, bersifat kemanusiaan, dan tidakberpihakan pada NGHHA

NGHHA merupakan badan-badan mandiri. Kemandirian dan ketidakberpihakan ini harus dihargai oleh pemerintah tuan rumah.

2 Pemerintah tuan rumah harus membantu para NGHHA mendapatkan akses secepatnya terhadap para korban bencana

Kalau NGHHA diharapkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, mereka seharusnya diberi akses yang cepat dan tidak berpihak terhadap korban bencana, untuk tujuan penyampaian bantuan kemanusiaan.

Adalah merupakan tugas tugas dari pemerintah tuan rumah, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kedaulatannya, untuk tidak menghalangi bantuan semacam itu, dan untuk menerima tindakan-tindakan yang tidak memihak dan apolitis dari NGHHA.

Pemerintah tuan rumah harus memudahkan masuknya staf bantuan penanggulangan secepat-cepatnya, terutama dengan membebaskan persyaratan transit, visa-visa masuk dan keluar, atau lekukan pengaturan-pengaturan agar persyaratan-persyaratan semacam itu diberikan dengan cepat.

Pemerintah harus memberikan izin terbang lintas dan hak mendarat bagi pesawat udara yang mengangkut pasokan-pasokan dan staf bantuan pananggulangan internasional selama jangka waktu tahap penanggulangan darurat.

3 Pemerintah seharusnya memudahkan aliran barang-barang bantuan dan informasi selama situasi bencana

Barang-barang bantuan dan peralatan-peralatan dibawa ke suatu negara dengan tujuan semata-mata untuk meringankan penderitaan manusia, bukan untuk manfaat atau keuntungan komersial. Pasokan-pasokan semacam itu biasanya harus diijinkan pelintasan secara bebas dan tanpa hambatan, dan tidak diharuskan untuk dilengkapi dengan sertifikat konsuler dari tempat asal atau tanda pembelian, surat izin atau peraturan-peraturan impor dan/atau ekspor, atau dikenakan cukai impor, bea pendaratan, atau tarikan pelabuhan.

Impor sementara dari peralatan bantuan penanggulangan, termasuk kendaraan, pesawat terbang ringan, dan piranti telekomunikasi harus dimudahkan oleh pemerintah tuan rumah melalui pengecualian dari peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan perijinan. Demikian pula sebaliknya, pemerintah harus tidak membatasi pengeksportan kembali peralatan bantuan bencana pada akhir operasi penanggulangan.

Untuk membantu komunikasi dalam situasi bencana, pemerintah tuan rumah disarankan agar menetapkan gelombang radio khusus, yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi benaturan penanggulangan untuk komunikasi baik dalam negeri maupun internasional demi keperluan-keperluan penanggulangan bencana, dan agar mengumumkan ketersediaan gelombang tersebut pada masyarakat penanggulangan bencana sebelum terjadinya peristiwa bencana. Pemerintah harus memberi kewenangan para petugas penanggulangan untuk mempergunakan semua cara komunikasi yang diperlukan untuk operasi penanggulangan.

4 Pemerintah seharusnya mengusahakan penyediaan informasi bencana dan pelayanan perencanaan secara terkordinasikan

Keseluruhan perencanaan dan kordinasi bantuan penanggulangan pada akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah. Perencanaan dan kordinasi dapat sungguh-sungguh terbantu kalau NGHHA diberi informasi tentang kebutuhan bantuan dan tentang sistem-sistem perencanaan dan

pelaksanaan bantuan, juga informasi tentang potensi resiko keamanan yang mungkin akan mereka hadapi oleh para NGHAs. Pemerintah disarankan dengan sangat untuk menyediakan informasi semacam itu untuk para NGHAs.

Untuk memudahkan koordinasi yang efektif dan penggunaan upaya-upaya bantuan secara efisien, pemerintah disarankan dengan sangat untuk menunjuk, sebelum peristiwa bencana, mekanisme satu pintu di pemerintah pusat yang dapat dihubungi oleh NGHAs yang datang.

5 Penanggulangan bencana dalam hal konflik bersenjata

Dalam hal konflik bersenjata, kegiatan-kegiatan bantuan diatur oleh peraturan-peraturan yang terkait dalam hukum kemanusiaan internasional.

Tambahan II: Saran-saran untuk Negara Donor

1 Negara donor seharusnya mengenali dan menghargai tindakan-tindakan yang mandiri, bersifat kemanusiaan, dan ketidakberpihakan pada NGHAs

NGHAs merupakan badan-badan mandiri yang kemandirian dan ketidakberpihakanannya harus dihargai oleh pemerintah negara donor. Negara donor tidak boleh menggunakan NGHAs untuk mengejar tujuan-tujuan politik atau ideologis.

2 Negara donor seharusnya memberikan dana bersama dengan jaminan untuk kemandirian operasional

NGHAs menerima bantuan dana dan materi dari pemerintah donor dengan kesamaan semangat seperti waktu mereka menyampaikannya kepada korban bencana; yaitu semangat kemanusiaan dan kemandirian tindakan. Pelaksanaan dari bantuan penanggulangan pada akhirnya adalah tanggung jawab NGHAs dan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari NGHAs sendiri.

3 Negara-negara donor seharusnya mempergunakan jasa kantor – kantor mereka untuk membantu NGHAs dalam memperoleh akses terhadap para korban bencana

Pemerintah donor harus menyadari pentingnya mereka memikul sebagian dari tanggung jawab terhadap keamanan dan kebebasan akses para petugas bantuan penanggulangan NGHAs ke lokasi-lokasi bencana. Mereka harus bersedia untuk melaksanakan diplomasi dengan pemerintah tuan rumah sehubungan dengan masalah-masalah seperti itu apabila diperlukan.

Tambahan III: Saran-saran untuk organisasi-organisasi antar pemerintah

1 IGO seharusnya menerima NGHAs, baik yang setempat maupun dari luar negeri, sebagai mitra yang berharga

NGHAs bersedia untuk bekerja dengan PBB dan Badan-badan antar pemerintah yang lain untuk menghasilkan penanggulangan yang lebih baik terhadap bencana. Mereka bekerjasama dalam semangat kemitraan dengan penghargaan terhadap integritas dan kemandirian dari semua mitra. Badan-badan antar pemerintah harus menghormati kemandirian dan ketidakberpihakan NGHAs. NGHAs harus dimintai pendapat pada waktu PBB mempersiapkan rencana penanggulangan.

2 IGO seharusnya membantu pemerintah tuan rumah dalam penyediaan kerangka kerja kordinasi menyeluruh untuk upaya-upaya internasional dan setempat dalam penanggulangan bencana

NGHAs biasanya tidak memiliki mandat untuk menyediakan kerangka kerja koordinasi menyeluruh untuk bencana-bencana yang menuntun tanggapan internasional. Tanggungjawab ini berada ditangan pemerintah tuan rumah dan pihak-pihak yang berwenang di PBB. Mereka ini disarankan dengan sangat untuk menyediakan pelayanan dengan tepat waktu dan efektif untuk membantu negara yang mengalami bencana, dan masyarakat penanggap bencana baik nasional maupun internasional.

Bagaimanapun, NGHHA harus melakukan segala upaya untuk memastikan koordinasi yang efektif dari pelayanan mereka sendiri.

Dalam hal konflik bersenjata, tindakan-tindakan penanggulangan diatur oleh peraturan-peraturan terkait dari hukum kemanusiaan internasional.

3 IGO seharusnya menyediakan kepada NGHHA perlindungan keamanan yang tersedia untuk organisasi-organisasi PBB

Dimana perlindungan keamanan disediakan untuk organisasi antar pemerintah, pelayanan harus disediakan kepada NGHHA yang menjadi mitra operasionalnya apabila diminta.

4 IGO seharusnya menyediakan untuk NGHHA akses yang sama terhadap informasi seperti yang diberikan kepada organisasi-organisasi PBB

IGO disarankan dengan sangat untuk membagi semua informasi, yang berkenaan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, dengan NGHHA mitra operasionalnya.

Proyek Sphere Piagam Kemanusiaan dan

Standar-standar Minimum dalam Penanggulangan Bencana

Para Pengguna buku acuan yang budiman, mohon dituliskan masukan-masukan yang terpetik dari pengalaman lembaga atau Anda secara pribadi dan saran-saran Anda pada isian di bawah ini. Gunakan lembar tambahan jika dibutuhkan.

Kirimkan formulir ini kepada:

Pusat Kajian Pengungsi, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Jalan Ir. H. Juanda No 367
Bandung 40135

Telepon (022) 250 4838, Fax: (022) 250 1330
e:mail: librarystkas@hotmail.com

Pusat Kajian Pengungsi, STKS bertindak sebagai koordinator umpan balik penggunaan Buku Sphere. Sebagai Koordinator, Pusat Kajian Pengungsi akan melakukan 2 tugas utama:

1. STKS akan membuat *data base* sederhana dengan mengelompokkan umpan balik tersebut dalam dua kategori yaitu (1) Pemahaman Buku Sphere dan (2) Pelaksanaan di Lapangan. Pemahaman Buku Sphere difokuskan pada pemahaman pengguna Buku Sphere terhadap isi buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Pelaksanaan di Lapangan meliputi penggunaan Buku Sphere sebagai bahan acuan sebuah proyek seperti manfaat bagi organisasi dan penduduk yang dibantu serta resiko yang dihadapi dan peluang yang diperoleh dalam menerapkan Standar Minimum.
2. Mengirimkan informasi yang sudah diolah dalam *data base* kepada SC UK dengan tembusan kepada Bakornas PBP. SC UK akan melanjutkan segala informasi yang berkaitan dengan pengalaman penggunaan Buku Sphere ke *Sphere Project* di Jenewa. Jika diperoleh tanggapan dari *Sphere Project*, SC UK akan mengirimkannya kepada Pusat Kajian Pengungsi dengan tembusan kepada Bakornas PBP untuk disebarluaskan. Informasi yang berkaitan dengan penerjemahan Buku Sphere akan disimpan untuk perbaikan kualitas Buku Sphere lebih lanjut.